

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Penulis mengambil judul tentang “**Munculnya Gerakan Iredentisme di Krimea pada tahun 2014**”. Alasan penulis untuk memilih judul ini adalah bergabungnya Krimea menjadi bagian Federasi Rusia. Seperti yang diketahui, Krimea sebelumnya merupakan bagian wilayah dari Ukraina yang sah menurut undang-undang Ukraina. Krimea pun bukanlah wilayah dimana warganya mengalami opresi dari pemerintah Ukraina dan nyaris tidak ada kekerasan etnis di Krimea. Pemerintah Ukraina juga bahkan, sejak Ukraina merdeka, telah mengupayakan integrasi Krimea secara menyeluruh dengan Ukraina. Namun, gerakan iredentisme tumbuh di sana pada tahun 2014. Maka dari itu, Penulis ingin mengetahui alasan mengapa gerakan iredentisme tersebut dapat muncul di Krimea pada tahun 2014.

Bagi Penulis pribadi, topik penulisan mengenai “**Munculnya Gerakan Iredentisme di Krimea pada tahun 2014**” mampu memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih mendalam tentang iredentisme. Iredentisme sendiri, tidak banyak di teliti oleh ilmuwan Hubungan Internasional dibanding topik-topik lain. Isu yang penulis ambil merupakan isu kontemporer karena terjadi pada tahun 2014, bahkan dari kasus ini memanjang menjadi konflik di Ukraina. Kemudian topik penulisan ini pun belum pernah ditulis dan dianalisis oleh mahasiswa

jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sehingga kajian ini menarik dan penulis berharap topik penulisan ini kedepannya dapat berguna bagi studi Ilmu Hubungan Internasional.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan, mengembangkan, mengaplikasikan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Selain itu, tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejarah Krimea dan meneliti alasan munculnya gerakan iredentisme di Krimea. Disamping itu tujuan lain dari penulisan skripsi ini yakni guna mengembangkan kemampuan penulis untuk mengaplikasikan teori-teori dalam ilmu hubungan internasional dalam memahami kasus negara-negara internasional.

Tujuan penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi strata-1 (S1), yakni memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Krimea merupakan daerah semenanjung yang memiliki luas wilayah sekitar 27.000 km<sup>2</sup>. Krimea terletak di sebelah utara Laut Hitam dan di sebelah barat Laut Azov. Wilayah Krimea berbatasan dengan Kherson, Ukraina di sebelah barat dan. wdi sebelah timur terdapat Selat Kerch yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Azov. Pada tahun 2007, penduduk di Krimea diperkirakan mencapai 2,35 juta warga dimana setengahnya adalah warga beretnis dan

berbahasa Rusia<sup>1</sup>, maka dari itu tidak heran ketika Krimea disebut sebagai basis warga pro-Russia di Ukraina. Krimea sendiri saat ini merupakan wilayah sengketa bagi Rusia dan Ukraina, dimana pihak Rusia telah menganeksasi wilayah Krimea menjadi bagian dari federasi Rusia pada tahun 2014, dimana sebelumnya diselenggarakan referendum untuk menentukan nasib Krimea. Sementara itu, Ukraina dan mayoritas masyarakat internasional tidak mengakui referendum Krimea yang juga berarti tidak mengakui bahwa Krimea adalah bagian dari wilayah Rusia

Krimea sebenarnya telah memiliki sejarah yang panjang dari pergantian pendudukan oleh kelompok-kelompok dominan. Sejak dahulu, wilayah ini telah dikuasai oleh Kerajaan Romawi, suku Goth, Hun, Kekaisaran Romawi Timur, dan Suku Mongol. Pada abad ke-9, wilayah ini pernah menjadi pusat perbudakan dibawah kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur dan terlebih di bawah kekuasaan Kesultanan Usman pada abad ke-18.<sup>2</sup> Pada tahun 1783, Krimea jatuh ke tangan Kekaisaran Russia dibawah kepemimpinan Katarina yang Agung. Krimea menjadi tempat terjadinya Perang Krimea pada tahun 1853 yang melibatkan Kekaisaran Rusia melawan aliansi yang terdiri dari Prancis, Britania, Kesultanan Usman, dan Sardinia, sebagai buntut dari perebutan pengaruh di Tanah Suci.

Pada saat perang saudara terjadi di Rusia, Krimea dikuasai oleh Tentara Putih. Setelah Kekaisaran Rusia runtuh pada peristiwa Revolusi Bolshevik,

---

<sup>1</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/Crimea>

<sup>2</sup> Adam Taylor, "To understand Crimea, take a look back at its complicated history" diakses dari <http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/02/27/to-understand-crimea-take-a-look-back-at-its-complicated-history/> pada tanggal 23 April 2014

Krimea menjadi bagian dari Uni Soviet pada tahun 1921. Pada masa ini, terjadi deportasi massal warga etnis Tatar di Krimea oleh pemerintahan Uni Soviet. Hal ini disebabkan karena pihak Soviet beranggapan warga etnis Tatar di Krimea adalah pengkhianat setelah sebagian dari warga etnis Tatar berada di pihak Jerman ketika Jerman menyerbu Uni Soviet. Namun beberapa pihak menyebut bahwa tindakan Soviet tersebut hanya upaya untuk menyingkirkan ancaman ketidakloyalan warga etnis Tatar terhadap pemerintahan Uni Soviet. Dengan ditinggalkannya wilayah Krimea saat itu, warga Uni Soviet mengisi wilayah Krimea dan menjadi jawaban mengapa wilayah Krimea dihuni oleh mayoritas warga etnis Rusia.<sup>3</sup>

Setelah Ukraina merdeka, Krimea menjadi bagian dari Ukraina. Pada masa awal kemerdekaan ini Krimea sempat dilanda gerakan separatisme. Untungnya, pemerintah Ukraina bisa meredam gerakan tersebut melalui serangkaian negosiasi dan perbaikan undang-undang, setelah sebelumnya Ukraina juga telah memperbaiki struktur politiknya. Hasilnya, hubungan antara Ukraina dan Krimea pun lebih stabil. Partai regional pun telah bergabung dengan sistem partai Ukraina. Pada tahun 1998, otonomi Krimea telah dilegitimasi melalui tiga langkah yang dilakukan pemerintah Ukraina, diantaranya; dikaabulkannya Konstitusi Krimea oleh parlemen Ukraina pada April 1996; Konstitusi Ukraina Juni 1996; ratifikasi akhir Konstitusi Krimea oleh parlemen Ukraina yang seklaigus

---

<sup>3</sup>J. Otto Pohl, " The Deportation and Fate of the Crimean Tatars", diakses dari <http://www.iccrimea.org/scholarly/jopohl.html> pada tanggal 23 April 2014

mengintegrasikan Republik Otonom Krimea ke dalam Ukraina secara lebih dalam.<sup>4</sup>

Setelah tahun 1998, situasi politik di Krimea lebih stabil dari sebelumnya. Aktivitas politik di Krimea pun berjalan normal, melibatkan interaksi antar etnis di Krimea. Meskipun Ukraina sempat dilanda ketidakstabilan politik pada Revolusi Oranye tahun 2004, hal tersebut tidak berdampak secara signifikan terhadap keadaan politik di Krimea. Perubahan terhadap elit-elit politik di pemerintahan Krimea bisa berjalan relatif baik. Keadaan yang tercermin dari keadaan politik di Krimea setelah Revolusi Oranye 2004 mengejutkan beberapa pihak, pasalnya tidak sedikit pihak yang memprediksi keadaan di Krimea akan memburuk karena dikhawatirkan terjadi konflik etnis di sana.

Dalam kondisi yang relatif kondusif ini, pemerintah Ukraina mengembangkan ekonomi wilayah Krimea secara signifikan. Salah satu upaya pemerintah Ukraina adalah dengan memfokuskan wilayah Krimea sebagai wilayah industri. Industri yang dikembangkan pun beragam, dari industri berat hingga industri katun, kulit, dan futniture. Selain itu, sektor pertanian dan bisnis masyarakat pun turut pula dikembangkan hingga semampu mungkin menopang ekonomi masyarakat Krimea. Karena memiliki keadaan alam yang indah, Krimea

---

<sup>4</sup> Gwendolyn Sasse. *The Crimea Question: Identity, Transition, and Conflict*. Cambridge, Mass: Distributed by Harvard University Press for the Harvard Ukrainian Research Institute, 2007. hlm. 198-200

juga merupakan salah satu tujuan wisata favorit bagi warga Ukraina dan Rusia. Pemerintah pun turut mengembangkan sektor ini.<sup>5</sup>

Perbaikan kondisi politik di Krimea paska tahun 1998 juga salah satunya disebabkan oleh membaiknya hubungan Ukraina dan Rusia. Salah satu upaya perbaikan hubungan kedua negara ini adalah dengan disepakatinya beberapa kesepakatan antara Ukraina dan Rusia, dua traktat utama yaitu *Black Sea Fleet Agreement* pada tanggal 28 Mei 1997 dan *Treaty on Friendship, Cooperation, and Partnership between Ukraine and the Russian Federation* pada tanggal 31 Mei 1997. *Black Sea Fleet Agreement* membahas tentang kesepakatan tentang pembagian armada Laut Hitam Rusia di wilayah Krimea, khususnya Sevastopol. Krimea menjadi rumah bagi Armada Laut Hitam sejak Kekaisaran Rusia. Armada LAut Hitam ini memiliki nilai historis bagi Rusia dan Krimea. Hal ini disebabkan karena Armada LAut Hitam ini bertempur dengan Sekutu Kesultanan Ottoman pada abad ke-18 dan melawan gempuran Jerman pada Perang Dunia II. Sevastopol sebagai pusat dari armada ini bahkan disebut-sebut sebagai kota pahlawanm bukan hanya bagi Krimea tapi juga Rusia. Jika saja Ukraina tidak menyetujui perjanjian ini, maka dalam jangka waktu 100 tahun pun, Ukraina tidak dapat membayar seluruh utangnya pada Rusia. Jadi perjanjian tersebut juga dinilai sebagai "*zero options*" dimana Rusia memperoleh izin pengoperasian

---

<sup>5</sup> Kementerian Luar Negeri Ukraina, "Autonomous Republic of Crimea" diakses dari <http://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/info/regions/1-crimea> pada tanggal 30 Agustus 2015

Armada Laut Hitam di Krimea, Ukraina memperoleh keringanan pembayaran utang untuk 20 tahun ke depan.<sup>6</sup>

Pada bulan November 2013, Ukraina dilanda gelombang demonstrasi massa yang masif dimana puluhan ribu *Euromaidan*<sup>7</sup> berkumpul di Kiev untuk menyerukan integrasi Ukraina dengan Uni Eropa memprotes kebijakan Presiden Yanukovych yang menolak tawaran bantuan ekonomi dari Uni Eropa<sup>8</sup>. Demonstrasi tersebut berakhir pada diturunkannya Presiden Viktor Yanukovych dari kursi kepresidenan Ukraina oleh parlemen Ukraina. Peristiwa ini pun kemudian menimbulkan ketidakstabilan politik di hampir seluruh wilayah Ukraina, termasuk Krimea.

Pada tanggal 16 Maret 2014, pemerintah daerah Krimea dibantu oleh kelompok bersenjata Krimea dan tentara Rusia menyelenggarakan referendum untuk memilih, apakah bergabung dengan Rusia atau merestorasi konstitusi tahun 1992<sup>9</sup>. Hasilnya setidaknya 95% warga Krimea memilih bergabung dengan Rusia.<sup>10</sup> Dengan diselenggarakannya referendum tersebut, pemerintah otonom Krimea menyatakan melepaskan diri dari Ukraina setelah selama 17 tahun menjadi bagian dari Ukraina. Sehari setelahnya, Majelis Tinggi Krimea

---

<sup>6</sup> B. Stewart, Dale. *The Russian-Ukrainian Friendship Treaty and The Search for Regional Stability in Eastern Europe*. hal 65-69

<sup>7</sup> Sebutan bagi para demonstran di Kiev. Mereka adalah warga Ukraina yang umumnya pro-Uni Eropa

<sup>8</sup> David Stern, " Huge Ukraine rally over EU agreement delay", diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-europe-25078952>

<sup>9</sup> Isi konstitusi tersebut adalah mengembalikan status otonomi Krimea yang memiliki status otonomi yang lebih tinggi dari status otonomi Krimea setelah tahun 1998 hingga 2014. Konstitusi tahun 1992 tersebut sudah dicabut oleh pemerintah Ukraina pada tahun 1998.

<sup>10</sup> *Ibid.*

mengumumkan hasil referendum serta mendeklarasikan kemerdekaan Republik Krimea, dengan cakupan wilayah Republik Otonom Krimea dan kota Sevastopol, secara formal. Parlemen Krimea pun mencabut sebagian undang-undang Ukraina dan menasionalisasi perusahaan nasional dan asing milik Ukraina di wilayah Krimea. Selain itu, mata uang Rusia, ruble, juga mulai diberlakukan sebagai mata uang resmi Krimea.

Di lain pihak, Rusia langsung menguarkan dekrit untuk mengakui kemerdekaan Krimea. Pada tanggal 18 Maret 2014, pemerintah Rusia dan perwakilan pemerintah Krimea menandatangani perjanjian penggabungan Krimea menjadi anggota federal Rusia. Sehari setelahnya, perjanjian tersebut diratifikasi oleh Mahkamah Federal sekaligus meresmikan status Krimea menjadi bagian dari Federasi Rusia. Atas hal tersebut, Uni Eropa dan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi atas tuduhan aneksasi terhadap wilayah Ukraina berupa pembekuan aset-aset warga Rusia, kerjasama, dan investasi dengan Rusia. Namun, Rusia bersikap dingin atas pemberlakuan sanksi tersebut.

#### **B. Rumusan Masalah :**

Dari uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan masalah berupa “Mengapa gerakan iredentisme dapat muncul di wilayah Krimea pada tahun 2014?”

## C. Kerangka Pemikiran

### Konsep Iredentisme

Istilah iredentisme diambil dari bahasa Itali, yaitu *irredenta*, yang berarti belum terpenuhi. Istilah ini merujuk pada pergerakan bangsa Itali untuk menganeksasi wilayah yang berpopulasi warga yang berbahasa Itali di wilayah Austria dan Swiss yang terjadi pada sekitar abad ke-19.<sup>11</sup> Sejak saat itu, istilah ini digunakan untuk merujuk pada gerakan yang dilakukan oleh sekelompok warga dari kelompok etnis tertentu di suatu negara untuk mengembalikan warga yang beretnis sama beserta wilayah mereka di negara yang berbatasan. Penggunaan istilah iredentisme ini kemudian bisa lebih diterapkan pada kasus aneksasi yang dilakukan oleh Jerman pada proses unifikasi Jerman tahun 1938.<sup>12</sup> Pada saat itu, Jerman menganeksasi wilayah Austria dan Sudetenland dari Ceko. Kemudian pada masalah perebutan wilayah Kashmir oleh India dan Pakistan yang masih berlangsung.

Iredentisme sendiri terbagi ke dalam dua jenis. Pertama, iredentisme terjadi atas klaim yang dilakukan kelompok etnis tertentu yang merupakan mayoritas di suatu negara dan etnis minoritas di negara tetangga. Dalam hal ini, secara implikasi iredentisme merupakan permintaan reunifikasi dilakukan oleh suatu negara untuk menggabungkan warga beretnis sama, beserta wilayahnya di luar perbatasannya, di negara lain, yang biasanya bertetangga. Selain itu,

---

<sup>11</sup> Jack C. Plano, Kamus Hubungan Internasional, terj. Wawan Juanda (Bandung: CV. Abardin, tahun 1990), hal. 28

<sup>12</sup> Naomi Chazan, *Irredentism and International Politics*, Lynne Rienner Publisher, Boulder, 1991

iredentisme juga dapat dilakukan oleh kelompok etnis minoritas secara terbuka untuk menuntut pemisahan wilayah yang ditempatinya dari negara, dimana wilayah itu berada, untuk kemudian bergabung dengan negara lain, dimana kelompok etnis tersebut menjadi mayoritas. Kedua, klaim iredentis bisa dilakukan oleh kelompok etnis minoritas yang berada di dua negara atau lebih. Dalam hal ini, kelompok etnis tersebut dapat meminta untuk bergabung ke satu negara, atau mendirikan negara-bangsa baru yang berdaulat. Contoh dari kasus ini adalah etnis Kurdis yang berada di Turki, Irak, dan Iran; etnis Pushtan di Afghanistan dan Pakistan; dan etnis Macedonia di Bulgaria dan Yunani.<sup>13</sup>

Adanya kelompok etnis minoritas di dalam wilayah mayoritas dominan disebabkan oleh konflik perebutan wilayah atau ekspansi yang terjadi dari waktu ke waktu, terutama pada masa kolonialisme. Pihak yang menang umumnya akan menguasai wilayah pihak yang kalah, sehingga terjadi perluasan wilayah bagi pihak yang menang atau melalui perjanjian perdamaian yang mengisyaratkan pembagian wilayah antar pihak yang berkonflik. Penduduk lokal yang mungkin berbeda etnis yang berasal dari pihak yang kalah akan bergabung dengan wilayah pihak yang menang. Hasilnya, pembagian wilayah tidak berdasarkan pada pengelompokkan etnis. Inilah kemudian yang akan menyebabkan gesekan budaya antara etnis satu dengan etnis.<sup>14</sup> Apabila pemerintah yang berkuasa tidak dapat meredam hal tersebut, bukan tidak mungkin di wilayah tersebut dapat timbul eskalasi konflik dan memicu perang di dalam negeri.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 2

<sup>14</sup> Walaupun demikian, tidak semua pertemuan etnis ini memicu gesekan.

Iredentisme sendiri biasanya didasari oleh dua motif, yaitu untuk meningkatkan *power*<sup>15</sup> dan persamaan etnis<sup>16</sup>. Dalam motifnya untuk menambah *power*, negara yang melakukan klaim iredenta menganggap wilayah yang ingin diklaim sudah seharusnya menjadi bagian dari negaranya. Dengan demikian, negara tersebut memiliki klaim iredenta dan persamaan etnis dengan minoritas di negara tetangga merupakan kausal untuk melakukan aneksasi. Tentunya, dengan menganeksasi wilayah negara tetangga dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi negara tersebut<sup>17</sup>, diantaranya dapat membuka akses terhadap sumber daya alam yang berada di wilayah yang dianeksasi, dan tentunya keuntungan geopolitik. Di sisi lain, persamaan etnis juga menjadi motif dari gerakan iredentisme. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa iredentisme merupakan usaha negara untuk mengembalikan warga etnis yang sama beserta wilayahnya di luar perbatasan negara tersebut, dan/atau gerakan kelompok etnis minoritas untuk memisahkan diri dari negaranya dan bergabung dengan negara induknya. Jika kelompok etnis minoritas memiliki hubungan baik dengan negara induknya, hal itu dapat menguatkan kehendak kelompok etnis minoritas tersebut untuk bergabung dengan negara induknya. Maka dari itu, iredentisme terkadang menimbulkan konflik bersenjata hingga perang berdarah.

Lepasnya Krimea ke tangan Rusia bukanlah soal menyoal tentang aneksasi dari Rusia semata. Hal yang terjadi lebih dari sekedar itu. Seperti yang sudah

---

<sup>15</sup> *Power* seperti pada konteks realisme

<sup>16</sup> Martin Griffiths, and Terry O'Callaghan, *International Relations: The Key Concepts 3rd Edition*. Routledge, 2014, hal 169

<sup>17</sup> terlepas dari kerugian yang didapat reaksi komunitas internasional, contoh sanksi.

dijelaskan sebelumnya, gerakan iredentisme didasari oleh kesamaan budaya atau etnis antara kelompok minoritas di suatu negara dengan kelompok etnis mayoritas di negara lain. Dalam kasus Krimea, ada keinginan dari warga Krimea sendiri terutama warga etnis Rusia di sana untuk bergabung dengan Rusia, 'rumah' yang mereka tinggalkan akibat runtuhnya Uni Soviet. Warga etnis Rusia sendiri merupakan penduduk mayoritas di Krimea, sebanyak 65,3% warga etnis Rusia, 15,1% warga etnis Ukraina, 12% warga etnis Tatar Krimea.<sup>18</sup> Kelompok etnis Rusia di Krimea berhasil mencuri momen di saat presiden yang pro-Rusia digulingkan. Penggulingan ini bisa saja meresahkan warga etnis Rusia di Krimea karena hal tersebut dapat mendekatkan Ukraina ke Barat. Mayoritas penduduk Krimea yang sebagian besar keturunan Rusia menuntut untuk bergabung ke Rusia. Dengan bergabung ke Rusia, penduduk Krimea mengharapkan untuk tidak menjadi minoritas dengan melebur dengan penduduk Rusia lainnya. Kehadiran tentara Rusia tentu diterima oleh warga Krimea dan itulah yang dapat memuluskan langkah Krimea untuk bergabung dengan Rusia.

### **Teori Konstruktivisme**

Konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu Hubungan Internasional yang berkembang pada abad ke-20 yang muncul sebagai kritik terhadap teori neorealisme dan neoliberalisme atas kegagalannya menjelaskan fenomena hubungan internasional yang semakin kompleks. Konstruktivisme

---

<sup>18</sup> The Moscow Times. "Crimea to Hold First Census Since Russian Annexation", diakses dari <http://www.themoscowtimes.com/news/article/crimea-to-hold-first-census-since-russian-annexation/509401.html> pada tanggal 16 Agustus 2015 pukul 15.39

diperkenalkan oleh beberapa tokoh seperti Nicholas Onuf, Alexander Wendt, Emanuel Adler, Friedrich Kratochwil, John Gerard Ruggie dan Peter Katzenstein.

Konstruktivisme memiliki pandangan umum bahwa dunia politik itu terkonstruksi secara sosial oleh aktor-aktornya. Alexander Wendt (1992,396-7) menyatakan bahwa "*A fundamental principle of constructivist social theory is that people act toward objects, including other actors, on the basis of the meanings that the objects have for them*". Aktor di dalam hubungan internasional sebenarnya memiliki pemahaman terhadap aktor lain dan lingkungan di sekitarnya. Dalam Konstruktivisme, ide bersama merupakan hal penting dalam membentuk politik internasional. Ide-ide ini merupakan ide intersubjektif dan diimplementasikan dalam praktek dan identitas. Jadi ide inilah yang kemudian memberikan arti terhadap objek yang menjadi perhatian aktor-aktor dalam politik internasional. Perlu diketahui bahwa ide ini<sup>19</sup>.

Konstruktivisme ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan neorealis dan neoliberalis mengenai bagaimana mereka melihat fenomena dalam hubungan internasional. Neorealis dan neoliberalis mendasarkan pemahaman mereka pada materialisme, dimana mereka melihat bahwa objek yang berupa materi dapat memberikan dampak yang langsung terhadap aktor tanpa mempertimbangkan ide-ide yang dibentuk masyarakat terhadap materi itu sendiri. Kedua pandangan ini, dengan kata lain, menganggap bahwa pola dan perilaku dalam hubungan dalam dunia internasional adalah sebagai manifestasi dari kekautan materialisme, seperti

---

<sup>19</sup> Alexander Wendt, 1992, *Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics*. International Organization. doi:10.1017/S0020818300027764 (dipublikasikan online:Jstor) hal. 13-20

sumber daya yang dimiliki oleh negara. Kedua pandangan ini, tidak terlalu melihat bahwa sebuah ide dapat menjadi kekuatan dalam aktivitas politik internasional, seperti dalam kerjasama, perlombaan senjata, dan pembentukan institusi. Di sisi lain, konstruktivisme berargumen bahwa struktur membentuk perilaku sosial dan politik para aktor dan struktur normatif dan ideal sama pentingnya dengan struktur materi. Selain itu, sistem dari ide kepercayaan dan nilai bersama juga memiliki karakteristik struktural dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap tindakan sosial dan politik para aktor, dan identitas sosial dari aktor politik.<sup>20</sup>

Salah satu contoh untuk membandingkan pandangan-pandangan ini adalah dengan menganalisa hubungan Amerika Serikat dengan Kanada dan Kuba terkait kepemilikan senjata nuklir. Amerika Serikat bersikap lebih kooperatif dengan Kanada daripada dengan Kuba pada Krisis Misil Kuba. Materialis akan kesulitan menganalisa kasus ini mengingat senjata nuklir yang dimiliki Kuba dan Kanada pada saat itu sama-sama memiliki kemampuan untuk menghancurkan wilayah Amerika Serikat, bahkan dalam kondisi geografis yang saling berdekatan. Hubungan ini didasari oleh ide yang dimiliki Amerika Serikat bahwa Kanada berada pada sisi yang sama dengan Amerika Serikat, tidak seperti Kuba. Ide ini terbentuk dari proses sejarah dan perilaku kedua negara terhadap Amerika Serikat pada waktu sebelum krisis dan saat krisis terjadi. Termasuk perbedaan ideologi Amerika Serikat dan Kuba saat Perang Dingin yang menjadikan hubungan kedua negara ini lebih panas.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Meskipun demikian, konstruktivisme tidak serta merta menganggap bahwa materialisme bukan hal yang patut dijadikan pertimbangan dalam menganalisa politik internasional. Konstruktivisme menilai bahwa materialisme aktor harus lebih dipahami melalui konsep sosial yang mendefinisikannya. Wendt menyatakan bahwa "*material resources only acquire meaning for human action through the structure of shared knowledge in which they are embedded*"<sup>21</sup>. Dengan kata lain, tanpa struktur yang terbentuk dari ide bersama, sumber material tidak akan berarti bagi aktor. Persepsi konstruktivisme terhadap suatu objek juga bukan lah sesuatu yang statis dan *given*, namun bersifat dinamis dan dapat dibentuk oleh aktor dari waktu ke waktu.

Dalam hal kepentingan, konstruktivisme melihat bahwa pemahaman terhadap bagaimana struktur non material yang dapat membentuk identitas itu penting, karena identitas dapat menentukan kepentingan aktor dan pada akhirnya dapat mengetahui tindakan aktor. Tidak seperti neoliberalis dan neorealis yang menilai bahwa kepentingan merupakan hal yang sudah ditentukan sebelumnya (berkutat pada *survival* dan *wealth*), konstruktivis menilai bahwa mengetahui bagaimana aktor mengembangkan kepentingannya, penting untuk menjelaskan fenomena politik internasional. Ini dikarenakan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa *interest* yang dipengaruhi oleh interaksi dan keadaan sosial, atau faktor materialis dapat menentukan *action*<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Scott Burchill, *Theories of international relations*. New York: St. Martin's Press. hal. 188-212

Menurut konstruktivis, struktur dan agen saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya, meskipun struktur dalam konstruktivisme dapat membentuk identitas dan kepentingan para aktor, namun struktur tersebut tidak akan terbentuk jika aktor-aktor yang terlibat tidak membagikan ide dan mempraktekannya secara terus menerus. Struktur ini terbentuk melalui tiga mekanisme, diantaranya imajinasi, komunikasi, dan pembatas. Konstruktivis meyakini bahwa struktur non material mempengaruhi persepsi aktor terhadap rencana tindakannya, batasan pada tindakannya dan strategi untuk mencapai tujuan mereka. Struktur tersebut akan membantu dalam pertimbangan aktor untuk mencapai tujuannya secara etis dan praktis. Komunikasi juga dapat membantu terbentuknya struktur. Ketika aktor akan mencari cara untuk membenarkan perilaku mereka, mereka biasanya akan mengacu kepada norma dari perilaku yang telah ada dan sah. Terakhir adalah bahwa konstruktivisme dapat memberi batasan. Seperti pada rasionalisasi, konstruktivisme percaya bahwa rasionalisasi terhadap suatu aksi dapat memiliki kekuatan moral karena sudah terdapat konteks sosial<sup>23</sup>.

Dalam relevansinya dengan permasalahan, Krimea merupakan daerah yang ditinggali oleh mayoritas etnis Rusia. Krimea memang menjadi wilayah di Ukraina yang menjadi basis warga pro-Rusia pada Krisis Krimea tahun 2014. Warga pro-Rusia di Krimea ini tentunya merupakan warga campuran yang mayoritas merupakan warga etnis Rusia di Krimea. Identitas warga pro-Rusia ini terbentuk dari hasil proses sejarah dan interaksi yang sudah terjalin sejak Kekaisaran Rusia berhasil menguasai semenanjung tersebut hingga masa Uni

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

Soviet. Pada saat pengusiran warga etnis Tatar oleh Stalin, warga etnis Rusia di Uni Soviet banyak yang berpindah ke Krimea bersama dengan warga etnis lain. Selama bertahun-tahun warga etnis Rusia menjadi mayoritas di Krimea, bahkan ketika Uni Soviet bubar, gerakan separatis di Krimea muncul dari mayoritas warga etnis Rusia. Setelah gerakan tersebut gagal dan Krimea pun menjadi bagian dari Ukraina pada tahun 1998.

Namun lepasnya Krimea dari Rusia atau Uni Soviet pada waktu itu, tidak menjadikan warga di semenanjung tersebut lupa akan sejarahnya, terutama warga etnis Rusia. Dengan secara resmi bergabung dengan Ukraina, warga-warga ini kemudian lantas berganti identitas. Karena pada dasarnya, warga pro-Russia ini sebelumnya berada pada struktur dimana mereka gagal berpisah dari Ukraina dan pembubaran Blok Russia sebagai wadah aspirasi warga pro-Russia ini menimbulkan identitas yang bertentangan dengan identitas Ukraina sebagai negara berdaulat. Hasilnya warga-pro Russia ini memiliki interest yang sedikit berubah dimana mereka tetap tidak melancarkan aksi separatis secara besar-besaran karena telah berada dalam negara berdaulat.

Setelah bertahun-tahun, warga pro-Russia ini tetap hidup sebagai warga Ukraina dan berdampingan dengan warga lain. Meskipun tidak ada konflik etnis sebelum Krisis Krimea tahun 2014, namun terdapat beberapa ketegangan antara warga pro-Russia dengan pemerintah Ukraina. Hingga pada peristiwa Krisis Ukraina yang dimulai pada tahun 2013, eskalasi konflik etnis mulai naik. Hasilnya, pada saat warga pro-Eropa berhasil menggulingkan presiden

Yanukovych, warga pro-Russia di Krimea mulai mengobarkan iredentis dengan turun ke jalan dan menolak pemerintahan Ukraina yang baru.

Pada perspektif konstruktivisme, gerakan iredentisme di Krimea sendiri terjadi pada saat tokoh oposisi menggulingkan presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovych, warga pro-Rusia melihat hal ini sebagai tindakan kudeta. Warga pro-Russia di Krimea sendiri melihat bahwa Yanukovych merupakan figur pilihan mereka yang sah dalam semua pemilu presiden Ukraina hingga menjabat menjadi presiden pada tahun 2010. Faktanya bahwa Krimea selalu menjadi basis pendukung Yanukovych pada pemilu, dengan 70% lebih suara<sup>24</sup>. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa tokoh oposisi didukung oleh banyaknya warga pro-Eropa (*Euromaidan*), bahkan oleh kalangan sayap kanan Ukraina, yang membantu menggulingkan presiden Yanukovych dengan diwarnai tindakan kekerasan di Kiev. Terlebih ketika pemerintahan Yanukovych tumbang di Ukraina, parlemen Ukraina merancang undang-undang untuk menghapus bahasa Rusia sebagai bahasa resmi kedua di Ukraina., meskipun Presiden interim Turcynov segera membatalkan rancangan tersebut. Hal-hal tersebut kemudian mengkonstruksi ide bahwa pemerintahan yang baru di Ukraina merupakan musuh mereka. Hingga mereka akhirnya melakukan referendum setelah mendapatkan "bantuan" dari Rusia, dan memutuskan untuk bergabung dengan Rusia pada tanggal 20 Maret 2014.

---

<sup>24</sup> BBC, "Crimea's loyalty split in Ukraine election", diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8493180.stm> pada tanggal 27 Maret 2015

#### **D. Hipotesis :**

Geakan iredentisme dapat muncul di Krimea karena:

1. Persamaan etnis antara warga etnis Rusia di Krimea dengan warga etnis Rusia di Rusia.
2. Terdapat konstruksi gagasan warga etnis Rusia di Krimea bahwa pemerintahan baru Ukraina adalah musuh bagi warga pro-Rusia di Krimea

#### **E. Metodologi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi, penulis studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa data yang diambil dari buku-buku diterbitkan, website serta berbagai media lain. Selain itu, penulis menggunakan sumber-sumber lain yang memiliki hubungan dengan topik yang diambil penulis.

#### **F. Jangkauan Penulisan**

Jangkauan penulisan dalam skripsi ini, penulis membatasi penelitian di mulai pada saat krisis Ukraina, yang nantinya berimbas pada pemisahan Krimea, pada akhir tahun 2013 hingga bergabungnya Krimea ke Rusia pada bulan Maret 2014. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan penulis juga akan mengambil referensi terkait peristiwa-peristiwa sebelumnya dan sesudahnya yang terkait dan dapat mendukung penelitian dalam penulisan skripsi ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini. Maka penulis berusaha untuk menulis secara sistematis dari bab ke bab, berikut ini adalah uraian singkat yang termuat dari bab ke bab:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi tentang Gambaran Umum Krimea, meliputi gambaran geografis Krimea dan sejarah Krimea. Bab ini penting untuk mengetahui Krimea secara geografis dan mengetahui sejarah Krimea secara komprehensif.

BAB III, berisi tentang Krisis Krimea tahun 2014, meliputi pembahasan tentang latar belakang Krisis Krimea dan Krimea menggelar referendum hingga bergabung dengan Rusia

BAB IV , berisikan tentang faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa gerakan iredentisme bisa muncul di Krimea dengan menggunakan konsep iredentisme dan teori konstruktivisme

BAB V, berisi tentang kesimpulan. Kesimpulan ini didasarkan pada data-data dan analisis yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya